

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adhim, M. F. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani. Jakarta.
- Aulia, Nuansa. 2008. *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet.II. Tim Redaksi Nuansa Aulia. Bandung.
- Faridh, Miftah. 1990. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Gema Insani. Jakarta.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2013. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Mizan. Bandung.
- Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Tintamas. Jakarta.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Kanusius. Yogyakarta.
- Kartono. 1996. *Psikologi Wanita Jilid I: Gadis Remaja dan Wanita Remaja*. Alumni. Bandung.
- Lubis, Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, dkk. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahman, Samson. 2007. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*. Pustaka IKADI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, dkk. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soetiksno. 2003. *Filsafat Hukum Bagian 1*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Solahudin, Penghimpun. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. Visimedia. Jakarta.

Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

Surbakti, EB. 2008. *Sudah Siakah Menikah ? Panduan Bagi Siapa Saja yang Sedang dalam Proses Menentukan Hal Penting dalam Hidup*. PT. Gramedia. Bandung.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Pranada Media Group. Jakarta.

Wiratha, Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Andi. Yogyakarta.

2. Karya Ilmiah

Lu'luil Hidayati, 2017, "*Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*", Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

Masrukhan, 2018, "*Faktor Dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2017)*", Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta.

Mochamad Samsukadi, dkk, 2017, "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2.

Muhamad Sobirin, 2009, "*Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur*", Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, Salatiga.

Rabbil Sonya Gesa, 2018, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)*, Naskah Publikasi Skripsi Fakultas Hukum, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tri Lisiani Prihatinah, 2008, “*Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8.

Wisono Mulyadi, dkk, 2017, “*Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*”, Jurnal Privat Law Vol. V No. 2.

Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo, 2014, *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan*, Vol. 02.

Zulfiani, 2017, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2.

3. Website

Academia, “Makalah Pernikahan Dini”, dari <https://www.academia.edu/6546241/Makalah-pernikahan-dini?auto=download>, diakses Minggu, tanggal 1 September 2019.

BBC, “MK tolak naikkan batas usia minimal untuk menikah”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah, diakses Minggu, pada tanggal 1 September 2019.

Detiknews, “Menag Dukung Putusan MK, Usia Nikah Pria-Wanita Minimal 19 Tahun”, <https://news.detik.com/berita/d-4344176/menag-dukung-putusan-mk-usia-nikah-pria-wanita-minimal-19-tahun>, Minggu, pada tanggal 1 September 2019.

Hukum Online, “Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum/>, diakses Minggu, tanggal 1 September 2019.

ID Pengertian, “Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli”, <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, diakses Kamis, tanggal 8 Agustus 2019.

Pengadilan Agama Giri Menang, “**Persyaratan Pengajuan Gugatan/Permohonan**”, <http://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-dispensasi-nikah>, diakses Minggu, pada tanggal 1 September 2019.

Slide share, “Asas-Asas Perkawinan-Perceraian Adat”, <https://www.slideshare.net/Qomaruzzaman84/asas-asas-perkawinan-perceraian-adat>, diakses Kamis, tanggal 8 Agustus 2019.

VOAINDONESIA, “MK Minta DPR Ubah Ketentuan Batas Usia dalam UU Perkawinan”, <https://www.voaindonesia.com/a/mk-minta-dpr-ubah-ketentuan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan/4698910.html>, diakses Minggu, pada tanggal 1 September 2019.

Wordpress Jimmy Hansen, SH, “Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia” <https://jimmyyansennainggolan.files.wordpress.com/2015/08/teori-sistem-hukum.docx>, diakses Rabu, tanggal 7 Agustus 2019.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

[Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.](#)

[Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.](#)